



Coordinating Ministry for Economic Affairs  
The Republic of Indonesia

# **MASUKAN BAHAN PENGUMUMAN KEBIJAKAN DEREGULASI SEPTEMBER 2015**

# I. INDUSTRI

## PERMASALAHAN

- Industri merupakan kegiatan usaha yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional karena banyak menyerap tenaga kerja, memberikan nilai tambah bagi sumber daya alam Indonesia yang melimpah dari kekayaan hasil laut nusantara; hasil kesuburan tanah pertanian, kebun, dan hutan khatulistiwa yang luas; dan beragam hasil tambang di bumi pertiwi; yang semuanya menjadi barang kebutuhan masyarakat dan sebagian dijual ke luar negeri.
- Namun berbagai gejolak ekonomi global dan kawasan sejak terjadinya krisis moneter tahun 1997/1998 berlanjut dengan krisis keuangan global tahun 2008 yang berpengaruh pada kelesuan ekonomi dunia yang sampai sekarang belum begitu pulih, serta diperpuruk dengan ketidakdisiplinan kita dalam memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, keterlambatan dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas, dan ketidakhati-hatian kita dalam memilih mitra modal dan teknologi, telah membuat industri nasional tidak berkembang dan cenderung terus menurun perannya terhadap pertumbuhan ekonomi kita.
- Meningkatnya ketergantungan industri kita terhadap impor baik karena ketertinggalan dalam infrastruktur, listrik, dan ketidakjelasan status ketersediaan lahan maupun belum terbangunnya konektivitas yang menghubungkan sumber-sumber daya secara efisien, membuat industri nasional tidak optimal dalam memproduksi barang-barang yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan barang-barang world class di pasar ekspor.

## RESPON KEBIJAKAN

- Oleh karena itu Pemerintah bekerja keras, mengambil langkah-langkah strategis, dan rangkaian kebijakan untuk memulihkan industri agar tidak menimbulkan pemutusan hubungan kerja yang banyak, meningkatkan daya saing industri yang sejajar dengan industri yang efisien di negara-negara lain, sehingga menjadi daya tarik investasi, dan memberikan berbagai inisiatif baru untuk membangun keunggulan industri nasional.
- Kebijakan deregulasi dilakukan untuk membangkitkan kinerja industri dengan menghilangkan berbagai peraturan, perizinan, dan birokrasi di berbagai kementerian dan lembaga yang menjadi beban waktu dan biaya produksi, menjadi kendala bagi masuknya investasi masyarakat, menjadi penghambat kelancaran perdagangan, dan menjadi mahalnya penyerapan bahan baku terutama dari hasil pertanian, perikanan, dan pertambangan kita sendiri.
- Peraturan-peraturan mengenai sistem pengupahan, penurunan harga gas, pengelolaan sumber daya air, insentif bagi pelayanan jasa angkutan dan pelabuhan, yang semuanya tercakup dalam kebijakan ekonomi nasional ini akan menjadi tambahan daya saing industri
- Berbagai peraturan yang mendukung pengembangan kawasan industri yang atraktif, pusat logistik berikat yang menyediakan barang-barang kebutuhan industri dan penyangga ekspor serta fasilitas yang mendukung pengembangan industri substitusi impor barang-barang FTA, tentu menjadi tambahan keunggulan bagi industri.

## MANFAAT

- Dengan kebijakan deregulasi ini, industri nasional menjadi tahan dan kuat menghadapi dinamika ekonomi global sehingga industri akan bekerja efisien dengan tingkat utilisasi yang penuh dan produktivitas yang tinggi untuk menghasilkan barang-barang yang dapat bersaing dengan barang-barang impor serta mampu melakukan diversifikasi produk dan pasar ekspor, yang tentunya pemutusan hubungan kerja dapat dicegah dan selanjutnya memperbaiki penyerapan tenaga kerja dari sektor industri.

## II. PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

### PERMASALAHAN

- Koperasi umumnya masih terkesan rancu dalam fungsinya sebagai lembaga usaha ekonomi atau sosial karena sejarah koperasi memang menjadi lembaga sosial untuk mendekatkan kegiatan simpan pinjam dan penyediaan kebutuhan masyarakat setempat.
- Tetapi kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan peranan koperasi sebagai badan usaha yang sejajar dengan badan usaha profesional lain justru memperkokoh kerancuan fungsi koperasi tersebut sehingga koperasi tidak mampu menyesuaikan diri dengan ragam kemajuan aktivitas bisnis modern dan menyerap berbagai fasilitas untuk berkembang.
- Demikian pula dengan usaha skala mikro kecil dan menengah yang sangat lambat untuk meningkatkan skala usahanya karena berbagai masalah konvensional yang tidak terselesaikan secara tuntas seperti masalah kapasitas SDM, kepemilikan, pembiayaan, pemasaran, dan sebagainya.
- Kondisi koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah ini menjadi permasalahan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang lembaga usaha dan sumber daya manusia dari beberapa negara tetangga memang lebih unggul dalam menciptakan barang dan jasa termasuk kemampuan untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan yang memediasi penjualan produk-produk mereka ke Indonesia.

### RESPON KEBIJAKAN

- Dalam kebijakan deregulasi ini, Pemerintah memangkas beban regulasi dan birokrasi untuk memperkuat fungsi koperasi sebagai lembaga ekonomi, dan meningkatkan peran usaha mikro kecil dan menengah dalam berbagai kegiatan ekonomi masyarakat serta menangkap peluang-peluang baru dalam kerjasama ekonomi kawasan.
- Mengeluarkan serangkaian peraturan-peraturan yang memperkuat kelembagaan koperasi di daerah, memperluas kepemilikan dan permodalan, pengembangan kerjasama usaha, pembiayaan syariah, serta peningkatan kapasitas dan kredibilitas.
- Selain itu Pemerintah mengeluarkan peraturan yang menyediakan fasilitas kemudahan impor bagi koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah untuk mengembangkan produk-produk tujuan ekspor.

### MANFAAT

- Dengan rasionalisasi kebijakan ini koperasi dan usaha mikro kecil menengah mampu berkembang secara luas di semua daerah untuk memproduksi barang-barang kebutuhan masyarakat dan ekspor termasuk produk-produk ekonomi kreatif yang menjadi karakter produk hasil usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
- Dengan demikian koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah Indonesia mampu bersaing dengan produk impor dan merambah pasar ASEAN.

# III. PERDAGANGAN

## PERMASALAHAN

- Sejak dahulu porsi peranan perdagangan kita baik volume perdagangan maupun ekspor dan impor tidak lebih dari satu persen nilai perdagangan dunia, bahkan sampai saat ini Indonesia belum banyak mensuplai jenis produk yang dikonsumsi dunia.
- Komposisi produk-produk ekspor kita masih berkisar pada produk-produk primer dan yang bernilai tambah rendah. Sebaliknya produk-produk yang kita impor terus berkembang baik jenis, volume maupun kecanggihan teknologinya.
- Beban regulasi dan birokrasi menjadi kendala utama efisiensi perdagangan dalam memenuhi kebutuhan industri, konsumsi, dan ekspor.
- Untuk ekspor saja terdapat 53 peraturan yang mencakup 2.278 jenis barang. Sedangkan untuk impor terdapat 79 peraturan yang mengatur 11.534 jenis barang sehingga sangat besar intervensi regulasi dan birokrasi dalam kelancaran perdagangan.
- Begitu banyak identitas sebagai pelaku ekspor maupun impor serta begitu beragam perizinan, rekomendasi, pemeriksaan, dan persyaratan dokumen yang diwajibkan untuk melakukan kegiatan ekspor impor
- Jadi kemampuan bersaing di pasar global bukan semata dari faktor eksternal dan kapasitas sumber daya manusia, melainkan beban regulasi dan birokrasi yang memperlambat perebutan peluang bisnis.

## RESPON KEBIJAKAN

- Dalam kebijakan deregulasi ini Pemerintah memangkas peraturan, menyederhanakan berbagai perizinan, dan mengurangi persyaratan yang tidak relevan, serta menghilangkan pemeriksaan yang tidak diperlukan, yang selama ini ditetapkan oleh 15 kementerian/lembaga atau 18 unit penerbit perizinan.
- Tentu deregulasi ini tidak berhenti karena masih akan terus berlanjut sampai ke peraturan dan perizinan tingkat daerah.
- Untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dalam pelayanan perizinan telah diperkuat sistem *Indonesia National Single Window* (INSW) suatu pelayanan loket elektronik tunggal dalam penyelesaian proses ekspor impor, yang menerapkan prinsip *single submission*, *single processing*, dan *single synchronous decision making* yang juga akan berlaku dalam kegiatan ekspor impor di kawasan ASEAN.

## MANFAAT

- Kelancaran perdagangan yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan deregulasi ini tentu akan memperlancar distribusi barang di seluruh Indonesia serta meningkatkan daya saing industri dan ekspor.
- Efisiensi *supply chain* akan menyelesaikan kelangkaan barang di berbagai daerah, menurunkan disparitas harga barang, dan menurunkan inflasi serta akan membuka peluang kerja yang lebih banyak.

# IV. PARIWISATA

## PERMASALAHAN

- Indonesia ibarat surga yang dicangkokkan ke bumi, karena kita memiliki berbagai daya tarik wisata yang bertujuan untuk menyenangkan mata (pemandangan), telinga (musik tradisional), hidung (aroma bunga-bunga), lidah (kuliner), dan kenyamanan lainnya (ekowisata, wisata religi, wisata bahari).
- Tetapi angka kunjungan wisata mancanegara saja kita masih dibawah Singapura yang hanya memiliki wisata belanja sebagai atraksi, Paris yang menjual fashion dan Eiffel Tower, bahkan Budapest yang hanya terkenal dengan kerajinan bordir, dan sebagainya.
- Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki sungai dan laut yang luas disertai dengan pesona biodiversity, marine sport, dan shore, sands, and sun di berbagai wilayah, tetapi tidak banyak kunjungan wisata bahari, jauh dibandingkan dengan Thailand, Malaysia bahkan Singapura, apalagi wilayah great barrier reef.
- Berbagai regulasi dan birokrasi menjadi kendala utama dalam pengembangan destinasi wisata dan menarik pelancong bahari yang terkenal sebagai *big spender tourist* .

## RESPON KEBIJAKAN

- Dalam kebijakan deregulasi ini, Pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang menambah negara bebas visa, serta menghilangkan persyaratan yang menghambat dan memperlambat kunjungan pelancong Yacht dan wisata bahari lainnya.

## MANFAAT

- Kunjungan wisata mancanegara akan terus meningkat sehingga mencapai target 20 juta pada tahun 2019 yang berdampak langsung terhadap penerimaan devisa, industri kreatif, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
- Penyerapan tenaga kerja langsung ataupun tidak langsung akan meningkat di sektor wisata terutama tenaga kerja instruktur diving dan snorkling, pemandu wisata, spa, kuliner, dan sebagainya.
- Selain itu usaha jasa perawatan dan penyewaan Yacht akan berkembang.

# V. NELAYAN

---

## PERMASALAHAN

- Kemampuan nelayan Indonesia sudah sangat terkenal di berbagai negara, bahkan kompetensi nelayan Indonesia diakui secara de facto dalam kerjasama ASEAN, hanya saja umumnya terkendala dengan tingkat pendidikan yang membuat nelayan kita sulit mendapatkan sertifikat kompetensi.
- Namun demikian, kehidupan nelayan sangat memprihatinkan karena tingkat kesejahteraan yang rendah baik dikarenakan kendala cuaca buruk yang panjang sebagai negara tropis maupun biaya melaut yang tinggi dibandingkan dengan hasil tangkapannya, yang sudah menjadi turun temurun dalam kehidupan nelayan.
- Pencemaran laut dan jenis perikanan yang bisa ditangkap dibawah 12 mil sebagai batas terjauh bagi nelayan kecil dan pembatasan peralatan tangkap, yang dibandingkan dengan ongkos solar yang tinggi membuat nelayan lebih memilih menjadi menyewakan kapal untuk memancing ketimbang menangkap ikan.

## RESPON KEBIJAKAN

- Dalam kebijakan deregulasi ini, Pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden untuk mengkonversi minyak solar ke LPG, sehingga terjadi penghematan biaya bahan bakar sebesar 70%.

## MANFAAT

- Apabila sekali melaut nelayan kecil membutuhkan solar sampai dengan 30 liter, maka biaya bahan bakar (Rp 6.900/liter) akan hemat sebesar Rp 144.900,- artinya dengan modal solar Rp 62.100,- dan jika nelayan mendapatkan 10 kg ikan kembung (asumsi seharga Rp 20.000,- per kilogram), maka nelayan memperoleh keuntungan sebesar Rp 137.900,- dikurangi biaya konsumsi dan umpan, paling tidak sekali melaut nelayan mendapatkan Rp 100.000,-
- Kebijakan ini tentu akan meningkatkan produksi ikan tangkap nasional sekaligus memperbaiki kesejahteraan nelayan.